



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TAHUN 2024 – 2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024 – 2028;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
10. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);

11. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024 – 2028.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu.
6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaanya.
7. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat KLLAJ adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.

8. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Kelompok Kerja Pilar yang selanjutnya disebut Pokja Pilar adalah Kelompok Kerja setiap Pilar Keselamatan.
11. Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara LLAJ.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusunan target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan LLAJ.
- (3) RAK LLAJ merupakan arahan dan pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan transportasi di Daerah.

BAB II PENDEKATAN DOKUMEN RAK LLAJ

Pasal 3

- (1) Dokumen RAK LLAJ menggunakan pendekatan 5 (lima) pilar meliputi :
 - a. Pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan;
 - b. Pilar 2 (dua), yaitu jalan yang berkeselamatan;
 - c. Pilar 3 (tiga), yaitu kendaraan yang berkeselamatan;
 - d. Pilar 4 (empat), yaitu pengguna yang berkeselamatan;
dan
 - e. Pilar 5 (lima), yaitu penanganan korban kecelakaan.
- (2) Dokumen RAK LLAJ Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ORGANISASI MANAJEMEN LLAJ

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu membentuk Tim Koordinasi RAK LLAJ Provinsi dan Kelompok Kerja Pilar.
- (2) Tim Koordinasi RAK LLAJ terdiri atas :
 - a. Ketua: Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Sekretaris: Kepala Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - c. Anggota: Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait keselamatan LLAJ dan dapat melibatkan pelaku usaha, swasta, serta akademisi.
- (3) Kelompok Kerja Pilar KLLAJ terdiri atas :

Pokja Pilar 1

- a. Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang perencanaan pembangunan daerah provinsi; dan
- b. Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait sistem yang berkeselamatan.

Pokja Pilar 2

- a. Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang jalan daerah provinsi; dan
- b. Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait jalan yang berkeselamatan.

Pokja Pilar 3

- a. Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan daerah provinsi; dan
- b. Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait kendaraan yang berkeselamatan.

Pokja Pilar 4

- a. Ketua: Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah; dan
- b. Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait pengguna jalan yang berkeselamatan.

Pokja Pilar 5

- a. Ketua: Kepala Organisasi Perangkat Daerah bidang Kesehatan daerah provinsi; dan
- b. Anggota: Organisasi Perangkat Daerah terkait penanganan korban kecelakaan.

- (4) Susunan ketua dan anggota pokja pilar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah kewenangan masing-masing.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melalui Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi RAK LLAJ Provinsi Bengkulu.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap tahun.

Pasal 6

- (1) Laporan evaluasi tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah secara teknis dilaporkan oleh Gubernur kepada Penanggung Jawab Pilar dengan tembusan kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat akhir September tahun berikutnya.

Pasal 7

Alur Evaluasi dan Pelaporan untuk RAK LLAJ sebagai berikut:

- a. Pokja Pilar melakukan evaluasi pelaksanaan dalam 3 (tiga) bulan sekali secara internal, yang selanjutnya dikolaborasi menjadi laporan tahunan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah;
- b. Pokja Pilar menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah tahunan kepada Tim Koordinasi LLAJ Daerah;
- c. Ketua Tim Koordinasi LLAJ menyampaikan laporan pelaksanaan RAK LLAJ Daerah tahunan kepada Gubernur dan dibahas dengan Forum LLAJ Daerah. Pembahasan dapat mengikutsertakan Badan Usaha, dan/atau Masyarakat; dan
- d. Ketua Tim Koordinasi LLAJ melalui Gubernur melaporkan hasil pembahasan evaluasi RAK LLAJ Daerah dalam Forum LLAJ Daerah kepada Penanggung Jawab Pilar dan akan dibahas dalam Forum LLAJ Nasional.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 8

Biaya pelaksanaan RAK LLAJ bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 4 September 2024

GUBERNUR BENGKULU,
Ttd,
H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

Ttd,

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



HENDRI DOMAN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19750825 200502 1 005

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN TAHUN 2024 – 2028

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Bengkulu Tahun 2024-2028

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Kinerja Tahun | | | | | OPD Penanggungjawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|-----------------------------------|---|--|--|----------------------|------|------|------|------|-----------------------------|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| PILAR-1 | | | | | | | | | | | |
| SISTEM YANG BERKESELAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Penguatan Koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan | | | | | | | | | | |
| | 1.1.1 | Pembentukan kantor sekretariat Forum LLAJ | Terbentuknya Sekretariat | | | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| | | a. Pembentukan Tim Sekretariat Forum LLAJ Provinsi . | Tersedianya SK Tim Sekretariat Forum LLAJ Provinsi . | √ | √ | | | | BAPPEDA | Dishub | APBD |
| | 1.1.2 | Penyusunan Peraturan Kepala Daerah | Terbitnya Peraturan Gubernur RAK LLAJ | √ | | | | | Sekretariat Daerah, Bappeda | Dishub | APBD |
| | 1.1.3 | Pembentukan kelompok kerja pilar dengan pemangku kepentingan | Terbentuknya kelompok kerja | | | | | | | | APBD |
| | | a. Pembentukan Kelompok Kerja di Sekretariat RAK LLAJ Provinsi . | Tersedianya SK Pokja di Sekretariat RAK LLAJ . | √ | √ | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | 1.1.4 | Penyusunan tata kelola dan pelaksanaan kelompok kerja dan kantor sekretariat | Tersedianya pedoman | | | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi | APBD |
| | | Penyusunan Tata Kelola dan Pelaksanaan Kelompok Kerja di Sekretariat RAK LLAJ Provinsi . | Tersedianya SOP Tata Kelola Pokja Sekretariat RAK LLAJ . | √ | √ | √ | | | | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Kinerja Tahun | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|---|---|---|----------------------|------|------|------|------|--|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 1.2 | Penyempurnaan Kebijakan dan Regulasi KLLAJ terkait Sistem yang Berkeselamatan | | | | | | | | | | |
| | 1.2.1 | Perumusan dan penyempurnaan kebijakan dan regulasi melibatkan semua pemangku kepentingan | Tersedianya rekomendasi kebijakan dan regulasi | | | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | a. Integrasi kebijakan peningkatan KLLAJ dalam prioritas program pada dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek Provinsi . | Tertuangnya rumusan kebijakan peningkatan KLLAJ dalam RPD/RPJMD dan RKPD | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA, ditambahkan OPD lain (Dishub) | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | b. Evaluasi implementasi peningkatan KLLAJ dalam dokumen perencanaan Provinsi . | Terlaksananya evaluasi terhadap kebijakan peningkatan KLLAJ dalam setiap tahun. | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA ditambahkan OPD lain (Dishub) | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | 1.2.2 | Perumusan indikator, monitoring dan evaluasi kinerja tiap pilar | Tersedianya rumusan evaluasi | | | | | | | | APBD |
| | | a. Integrasi indikator kinerja dalam dokumen perencanaan pembangunan | Tersusunnya indikator kinerja yang terintegrasi | √ | √ | √ | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| 1.3 | Pengembangan dan Integrasi Data dan Sistem Informasi KLLAJ setiap Pilar | | | | | | | | | | |
| | 1.3.1 | Pengintegrasian seluruh data dari para pemangku kepentingan | Tersedianya data yang terintegrasi | | | | | | BAPPEDA, POLDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes, Dinkominfo | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan | |
|------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|------|------|------|------|----------------------|---------------------|--|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | a. Inventarisasi sistem informasi dari instansi terkait di semuapilar | Teridentifikasinya daftar sistem informasi yang berpotensi untuk diintegrasikan | √ | √ | | | | BAPPEDA,POLDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes, Dinkominfo | APBD |
| | | | b. Koordinasi proses integrasi system informasi terkait KLLAJ | Surat kesediaan integrasi sistem | | | √ | √ | | BAPPEDA,POLDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes, Dinkominfo | APBD |
| | | | c. Pembuatan dashboard integrasi data KLLAJ | Tersedianya dashboard integrasi data | | | | √ | √ | BAPPEDA,POLDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes, Dinkominfo | APBD |
| 1.3.2 | Penguatan sistem pengelolaan data terpadu keselamatan LLAJ | | | Tersedianya sistem | | | | | | BAPPEDA,POLDA | BAPPEDA, DINAS PUPR, Dishub, Dinkes | APBD |
| | | | a. Optimalisasi penggunaan data terkait KLLAJ dalam perencanaan peningkatan KLLAJ terkait proses perencanaan pembangunan daerah | Terupdatenya data series terkait KLLAJ dalam dokumen rencana pembangunan daerah | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA,POLDA | BAPPEDA, DINAS PUPR, Dishub, Dinkes | APBD |
| 1.3.3 | Diseminasi kondisi KLLAJ tahunan | | | Tersedianya update data kondisi KLLAJ tahunan | | | | | | BAPPEDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes | APBD |
| | | | a. Kesepakatan jenis dan sumber data terkait kondisi KLLAJ yang akandigunakan dalam dokumen perencanaan | Tertindakannya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes | APBD |
| | | | b. <i>Updating</i> inventarisasi data kondisi KLLAJ setiap tahun | Tertindakannya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | DINAS PUPR, Dishub, Dinkes | APBD |
| 1.4 | Pengembangan Sistem Manajemen KLLAJ | | | | | | | | | | | |
| | 1.4.1 | Pengembangan sistemriset kecelakaan | | Tersedianya hasil kajian kecelakaan | | | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan | |
|------------------------------|---|--|--|--|------|------|------|------|----------------------|------------------------------|---|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | a. Kajian pengembangan sistem riset kecelakaan | Terselenggaranya kajian | √ | √ | √ | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| | | | b. Sinkronisasi/kolaborasi riset kecelakaan | Terwujudnya koordinasi | | √ | √ | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| | | | c. Penyelenggaraan riset penyebab terjadinya kecelakaan sesuai dengan kebutuhan keselamatan jalan | Terselenggaranya kegiatan | | √ | √ | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| | | | d. Pemetaan hasil riset kecelakaan | Tersusunnya pemetaan | | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| | | | e. Fasilitasi kajian/penelitian terkait penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan dan kejadian kecelakaan yang aktual | Terselenggaranya kajian | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| 1.5 | Penguatan Kemitraan dan Kerja Sama KLLAJ | | | | | | | | | | | |
| | 1.5.1 | Pengembangan inisiatif dan inovasi kemitraan KLLAJ | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | Dinas Penanggung Jawab Pilar | Badan Usaha, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | | a. Fasilitasi inisiatif dan inovasi peningkatan kemitraan KLLAJ | Terlaksananya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinas Penanggung Jawab Pilar | Badan Usaha, Mitra Pembangunan | APBD |
| 1.6 | Penyelenggaraan Sinkronisasi Perencanaan, Studi dan Evaluasi Terhadap Kebijakan Program KLLAJ | | | | | | | | | | | |
| | 1.6.1 | Sinkronisasi perencanaan | | Terakomodirnya rencana aksi dalam dokumen perencanaan di semua OPD Penanggung Jawab Pilar maupun pendukung | | | | | | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan | |
|------------------------------|---|---|---|----------------------------------|------|------|------|------|----------------------|------------------------------|--|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | a. Sinkronisasi capaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pemerintah Daerah terhadap program RAK LLAJ | Terlaksananya capaian kerja | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | | b. Penyusunan rencana kegiatan KLLAJ untuk dicantumkan dalam RKA Pemerintah Daerah | Tersusunnya rencana kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | | c. Penjabaran capaian kerja pada RKA dalam dukungan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) | Terlaksananya capaian kerja | √ | | | | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | | | d. Evaluasi terhadap pelaksanaan RAK dalam dokumen perencanaan baik di pemerintahan pusat maupun daerah | Terlaksananya evaluasi | √ | | √ | | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | 1.6.2 | Pelaksanaan studi dan evaluasi KLLAJ 5 Pilar | | Dokumen hasil studi dan evaluasi | √ | √ | √ | √ | √ | Dinas Penanggung Jawab Pilar | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Mitra Pembangunan | APBD |
| | 1.6.3 | Penerapan hasil studi dan evaluasi sebagai dasar penanganan KLLAJ | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinas Penanggung Jawab Pilar | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Dinas Pendidikan, Perguruan Tinggi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Mitra Pembangunan | APBD |
| 1.7 | Penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KLLAJ | | | | | | | | | | | |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|----------------------------------|--|--|--|------------------|------|------|------|------|---------------------------|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 1.7.1 | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar, Pemerintah Kabupaten/Kota | APBD |
| 1.7.2 | Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitaskorban | | Update data jumlah kecelakaan dan fatalitas korban | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| 1.7.3 | Pengukuran kinerja sosial-ekonomi akibat dari perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban | | Data hasil kajian | √ | √ | √ | √ | √ | BAPPEDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBD |
| 1.7.4 | Monitoring penyusunan dan implementasi RAK LLAJ Kabupaten/Kota | | Tersusunnya RAK LLAJ Kabupaten/Kota | √ | √ | √ | √ | √ | Bappeda, Dishub | Dinas PUPR, Polda, Dinkes Kabupaten/Kota | APBD |
| PILAR-2 | | | | | | | | | | | |
| JALAN YANG BERKESELAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Pengawasan Jalan yang Berkeselamatan | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Penyelenggaraan laik fungsi menuju jalan yang berkeselamatan | | | | | | | | DINAS PUPR, Dishub, POLDA | | APBD |
| | | a. Dukungan tim uji laik fungsi jalan | Terlaksananya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR, Dishub, POLDA | | APBD |
| | | b. Perencanaan perbaikan/penyediaan perlengkapan jalan-jalan provinsi sesuai hasil uji laik fungsi | Terlaksananya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| 2.2.2 | Pelaksanaan audit jalan dari perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | DINAS PUPR | Dishub | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan | |
|------------------------------|--|---|---|---------------------------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|------------------|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | | a. Dukungan pelaksanaan audit perencanaan hingga pelaksanaan konstruksi jalan dari aspek KLLAJ | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | 2.2.3 | Pelaksanaan inspeksi secara berkala pada jalan yang beroperasi | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | | | a. Dukungan pelaksanaan inspeksi secara berkala jalan yang sudah beroperasi | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| 2.3 | Pengendalian Fungsi, Kegiatan dan Pengendalian Bahaya di Ruang Jalan | | | | | | | | | | | |
| | 2.3.1 | Perencanaan atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | | | a. Dukungan perencanaan atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLAJ | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | 2.3.2 | Pengendalian atas fungsi, kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | | | a. Dukungan pengendalian atas fungsi kegiatan dan pengendalian bahaya di ruang jalan dari aspek KLLAJ | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| 2.4 | Perbaikan badan jalan | | | | | | | | | | | |
| | 2.4.1 | Pelaksanaan perbaikan kerusakan lajur lalu lintas | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |
| | 2.4.2 | Pelaksanaan perbaikan bahu jalan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR | Dishub | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|--|---|--|------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 2.5 | Penyelenggaraan penanganan keselamatan pada tahap konstruksi | | | | | | | | | | |
| | 2.5.1 | Audit dan inspeksi aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR, Dishub, POLDA | APBD | |
| | 2.5.2 | Pengendalian dan pengawasan aspek keselamatan pengguna jalan pada pekerjaan jalan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | DINAS PUPR, Dishub, POLDA | APBD | |
| 2.6 | Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan | | | | | | | | | | |
| | 2.6.1 | Pelaksanaan inventarisasi daerah rawan kecelakaan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | | a. Adanya audit keselamatan jalan secarabersama, baik di daerah rawan kecelakaan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | | b. Terlaksananya surveijalan daerah rawan kecelakaan secara berkelanjutan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | 2.6.2 | Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | | a. Perencanaan dan koordinasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | 2.6.3 | Penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan | Persentase lokasi tertangani | 20% | 50% | 70% | 90% | 100% | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | APBD | |
| | | a. Penanganan berupa manajemen dan rekayasa lalu lintas pada lokasi dan daerah rawan kecelakaan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, POLDA | APBD | |
| | | b. perbaikan jalan di lokasi dan daerah rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan Provinsi | Berkurangnya lokasidan daerah rawan kecelakaan | √ | √ | √ | √ | √ | PUPR, Dishub, Polda | APBD | |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|------------------|------|------|------|------|---------------------------|---------------------|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 2.6.4 | Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, DINAS PUPR, POLDA | | APBD |
| PILAR-3 | | | | | | | | | | | |
| KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pemenuhan Persyaratan Laik Fungsi Jalan dan Perlengkapan Jalan | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Pelaksanaan pemenuhan persyaratan perlengkapan jalan (pemasangan dan perbaikan) | | Terpenuhinya perlengkapan | | | | | | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| | | a. Detail desain pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLAJ | Tersedianya desain | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| | | b. Pelaksanaan pemasangan atau perbaikan perlengkapan jalan bidang LLAJ | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| 3.2 | Pelaksanaan audit dan inspeksi hukum lalu lintas serta perlengkapan jalan (termasuk Hazard) | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | | | APBD |
| | | a. Pelaksanaan audit dan inspeksi perlengkapan jalan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| 3.2 | Penyelenggaraan Fasilitas bagi Pejalan Kaki dan Pesepeda terutama di Jalan Perkotaan | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Perencanaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|---|--|---------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| | 3.2.2 | Penyediaan prasarana bagi pejalan kaki dan pesepeda di jalan perkotaan | Terselenggaranya kegiatan | 40% | 60% | 75% | 85% | 100% | Dishub | DINAS PUPR | APBD |
| 3.3 | Pelaksanaan Andalalin | | | | | | | | | | |
| | 3.3.1 | Monitoring dan evaluasi andalalin pada tiap tahapan agar benar-benar dilaksanakan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, POLDA | | APBD |
| 3.4 | Penyelenggaraan Batas Kecepatan Kendaraan | | | | | | | | | | |
| | 3.4.1 | Pemberlakuan pembatasan kecepatan kendaraan yang berkeselamatan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR, POLDA | APBD |
| | 3.4.2 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembatasan kecepatan kendaraan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | DINAS PUPR, POLDA | APBD |
| 3.5 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | | | | | | | | | | |
| | 3.5.1 | Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | POLDA, DINAS PUPR | APBD |
| | 3.5.2 | Sosialisasi/pembinaan terkait NSPK bidang penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | POLDA, DINAS PUPR | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|---|--|------------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 3.5.3 | Pengembangan diikat SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan yang terakreditasi | | Persentase SDM terakreditasi | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | Dishub | | APBD |
| 3.5.4 | Pelaksanaan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan | | Persentase SDM terakreditasi | 50% | 60% | 70% | 75% | 80% | Dishub | | APBD |
| 3.6 | Penegakkan Hukum atas Kepatuhan Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan | | | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Pelaksanaan sosialisasi dan kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD | POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha | APBD |
| | | a. Sosialisasi penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD | POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha | APBD |
| | | b. Kampanye penindakan kendaraan bermuatan dan dimensi berlebih | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD | POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha | APBD |
| | | c. Sosialisasi bahaya kendaraan ODOL secara kreatif dan inovatif | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD | POLDA, Organisasi Angkutan Darat, BadanUsaha | APBD |
| 3.6.2 | Pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan batas muatan, di jalan provinsi dengan alat uji muatan secara <i>mobile</i> | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD, POLDA | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.6.3 | Penegakan hukum pemenuhan persyaratanteknis dan laik jalan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD, POLDA | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|---|--|---------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 3.6.4 | Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penegakan hukum pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, BPTD, POLDA | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.7 | Penyelenggaraan Kepatuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan | | | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laikjalan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | POLDA | APBD |
| 3.7.2 | Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan atas pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub, POLDA | | APBD |
| 3.7.3 | Pengawasan angkutan umum baik di terminal maupun di luar terminal | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.8 | Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum | | | | | | | | | | |
| 3.8.1 | Pelaksanaan sosialisasi SMK perusahaan angkutan umum | | Terselenggaranya kegiatan | | | | | | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBD |
| | | a. Sosialisasi Peraturan Penilai SMK Perusahaan Angkutan Umum | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBD |
| | | b. Sosialisasi Peraturan Kewajiban Penyusunan SMK Perusahaan Angkutan Umum | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBD |
| | | c. Sosialisasi kewajiban pemenuhan SMK perusahaan angkutan umum | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBD |
| 3.8.2 | Pelaksanaan penerapan dan pembinaan SMK angkutan umum orang | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|---|---|--|--|------------------|------|------|------|------|------------------------|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 3.9.3 | Pelaksanaan penerapan dan pembinaan SMK angkutan umum barang | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.8.4 | Peningkatan kompetensiSDM pembina SMK angkutan umum (penilai, instruktur dan pengawas) | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.8.5 | Pemeringkatan perusahaan angkutan umum yang berkeselamatan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.8.6 | Penerapan perlengkapan/alat deteksiwaktu kerja mengemudi | | Tersedianya perlengkapan/alat | | | | | | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.9 | Penyelenggaraan Pemenuhan Standar Teknis Keselamatan sesuai Kaidah Internasional | | | | | | | | | | |
| 3.9.1 | Pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBD |
| 3.10 | Forum LLAJ Provinsi | | | | | | | | | | |
| 3.10.1 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan | | Fasilitasi kegiatan Forum LLAJ Provinsi | √ | √ | √ | √ | √ | Sekda, Dishub, Bappeda | PUPR, POLDA, DINKES, unsur pendukung lainnya | APBD |
| PILAR-4 PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Pengembangan Pendidikan Berjalan Lintas | | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselamatan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBN |
| 4.1.2 | Pengembangan infrastruktur dan instrumen pendidikan berlalulintas (misal: taman lalu lintas, pembuatan aplikasi permainan online yang dapat diunduh | | Tersedianya infrastruktur dan instrumen pendidikan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Dinas Pendidikan, DINASPUPR | APBN |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan | |
|------------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------------|------|------|------|------|------------------------------|--|--|------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | | |
| | | Edukasi keselamatan berlalu lintas | | | | | | | | | | |
| | 4.1.3 | Pelajar Pelopor Keselamatan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dishub | Dinas Pendidikan | APBN | |
| 4.2 | Kampanye dan Sosialisasi KLLAJ | | | | | | | | | | | |
| | 4.2.1 | Kampanye Umum KLLAJ | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinas Penanggung Jawab Pilar | Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN | |
| | 4.2.2 | Kampanye KLLAJ di fasilitas Pendidikan (sekolah dan kampus) | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Dinas Pendidikan, Jasa Raharja | APBN | |
| | | | a. Giat-giat pendidikan keselamatan jalan agar ditingkatkan pada usiadini b. Secara terus menerus dilaksanakan pembinaan (edukasi) terhadap para pengguna jalan c. Edukasi keselamatan berlalu lintas melalui PoCil, PKS dan Saka Bhayangkara d. <i>Police goes to School and Campus</i> e. Lomba duta pelajar pelopor keselamatan berlalu lintas | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Dinas Pendidikan, JasaRaharja | APBN |
| | 4.2.3 | Kampanye cara berkendara yang berkeselamatan | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN | |
| | | | a. Kegiatan <i>Art Policing</i> pada saat <i>Car Free Day</i> | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|---|---|---------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 4.2.4 | Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat terhadap KLLAJ | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Dinkominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN |
| | | a. Kampung tertib berlalulintas sebagai contoh, pilot proyek di wilayah masing-masing | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub | APBN |
| 4.2.5 | Kampanye 7 (tujuh) faktor risiko utama (helm, sabuk keselamatan, speeding, penggunaan ponsel, mengemudi dalam keadaan mabuk, penggunaan truk untuk angkutan manusia dan melawan arah) | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Dinkominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN |
| | | a. Taman kota yg berada di seluruh wilayah agar ditambahkan edukasi lalu lintas (misalnya adanya rambu- rambu lalu lintas dan miniatur jalan yg berkeselamatan) | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub | APBN |
| 4.2.6 | Kampanye perilaku hidup sehat di jalan bagi pengemudi kendaraan bermotor, pesepeda, dan pejalan kaki | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | POLDA, Dishub, Dinkominfo, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, Jasa Raharja | APBN |
| 4.3 | Integrasi Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan pencatatan data pelanggaran | | | | | | | | | | |
| 4.3.1 | Penyelenggaraan dan penyempurnaan SIM Onlinedan Smart SIM (SIM elektronik) | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | | APBN |
| 4.3.2 | Penerapan Demerit Point System | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | | APBN |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|--|---|-------------------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|--|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 4.4 | Penyempurnaan persyaratan dan prosedur uji SIM | | | | | | | | | | |
| | 4.4.1 | Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan calon pengemudi saat uji SIM | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | POLDA | APBN |
| 4.5 | Pembinaan teknis pendidikan dan pelatihan mengemudi | | | | | | | | | | |
| | 4.5.1 | Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP | APBN |
| | 4.5.2 | Pelaksanaan sertifikasi SDM diklat mengemudi | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat, BNSP | APBN |
| 4.6 | Penyediaan dan penggunaan teknologi untuk informasi dan penegakkan hukum | | | | | | | | | | |
| | 4.6.1 | Pemenuhan SDM untuk melakukan penegakkan hukum secara elektronik | Tersedianya SDM | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | | APBN |
| | 4.6.2 | Penyelenggaraan penegakkan hukum dan pemolisian berbasis elektronik | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub | APBN |
| | 4.6.3 | Sosialisasi penindakan ETL (Elektronik Traffic Low Enforcement) | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dinas Penanggung Jawab Pilar | APBN |
| 4.7 | Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum bagi 7 (tujuh) Faktor Risiko | | | | | | | | | | |
| | 4.7.1 | Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko | Persentase kepatuhan pengguna jalan | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | POLDA | Dishub | APBN |
| | | a. Pengaktifan kembalidan penambahan Kawasan Tertib Berlalu lintas | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub | APBN |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|-------------------------------------|--|--|---|------------------|------|------|------|------|----------------------|---|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 4.7.2 | Kepatuhan pemasangan perlengkapan keselamatan pengemudi dan penumpang kendaraan | | Persentase kepatuhan penggunajalan | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | POLDA | Dishub | APBN |
| 4.7.3 | Kepatuhan terhadap aturanlalu lintas | | Persentase kepatuhan pengguna jalan | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | POLDA | Dishub | APBN |
| 4.8 | Pemeriksaan Kondisi Pengemudi | | | | | | | | | | |
| 4.8.1 | Pemeriksaan kesehatan pengemudi | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Dishub, POLDA, Badan Usaha, Organisasi Angkutan Darat | APBN |
| 4.9 | Penyidikan Perkara dan Rekonstruksi Kecelakaan Lalu Lintas | | | | | | | | | | |
| 4.9.1 | Peningkatan kemampuan keahliaan penyidik perkara dan rekonstruksi kecelakaan lalu lintas | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | POLDA | Dishub, DINAS PUPR, Dinkes, KNKT | APBN |
| PILAR-5 | | | | | | | | | | | |
| PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu | | | | | | | | | | |
| 5.1.1 | Penyelenggaraan <i>Public Safety Center (PSC)</i> | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | APBD/APBN |
| 5.1.2 | Penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | APBD/APBN |
| 5.1.3 | Penyediaan tenaga medis dan atau tenaga kesehatanyang kompeten | | Tersedianya tenaga medis dan atau tenaga kesehatanyang kompeten | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes, BKD | Rumah Sakit | APBD |
| 5.1.4 | Penyediaan layanan rumah sakit rujukan | | Tersedianya layanan rumah sakit | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit | APBD |
| 5.1.5 | Keterlibatan komunitas yang terlatih dalam meresponkejadian kecelakaan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | BPBD, Badan Usaha | APBD |

| Program Dan Rincian Kegiatan | | | Indikator | Target Tahun Ke- | | | | | OPD Penanggung Jawab | OPD/Pihak Pendukung | Sumber Pendanaan |
|------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|------|------|------|------|----------------------|---------------------------|------------------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | | |
| 5.1.6 | Penanganan korban di instalasi gawat darurat diseluruh rumah sakit | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit, JasaRaharja | APBD |
| 5.1.7 | Pelatihan Masyarakat dalam Terlatih dalam Penanganan Pertama Gawat Darurat (PPGD) | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit, JasaRaharja | APBD |
| 5.2 | Pengembangan Sistem Komunikasi Layanan Gawat Darurat | | | | | | | | | | |
| 5.2.1 | Pelaksanaan sosialisasi <i>One Access Code</i> sebagai bagian aturan penanganan kecelakaan yang diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit, Dinkominfo | APBD |
| 5.3 | Rehabilitasi Pasca Kecelakaan | | | | | | | | | | |
| 5.3.1 | Rehabilitasi medis pasca kecelakaan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit, JasaRaharja | APBD |
| 5.3.2 | Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan | | Terselenggaranya kegiatan | √ | √ | √ | √ | √ | Dinkes | Rumah Sakit, Jasa Raharja | APBD |

GUBERNUR BENGKULU

Ttd,

H. ROHIDIN MERSYAH

